

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Saat mempublikasikan laporan keuangan, perusahaan ingin menjelaskan seberapa baik kinerja perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi kinerja operasional perusahaan (Trisnawati, 2022). Dengan begitu eksistensi perusahaan akan tetap terjaga. Manajemen perlu melaporkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang tepat dan dapat digunakan untuk menilai kondisi perusahaan. Laporan keuangan merupakan representasi kinerja perusahaan yang diwajibkan untuk disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PSAK No. 1 menekankan bahwa tujuan utama laporan keuangan adalah memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan perusahaan. Informasi tersebut sangat penting bagi berbagai pihak, seperti investor, kreditor, dan pemerintah, dalam pengambilan keputusan ekonomi. Namun, meskipun laporan keuangan dirancang untuk transparansi, tidak jarang ditemukan praktik kecurangan yang merugikan.

Kecurangan atau *fraud* merupakan fenomena yang berbahaya dan masih berkembang hingga saat ini. *Fraud* dapat dikatakan sebagai penyimpangan dan suatu perbuatan ilegal yang dilakukan secara sadar demi tujuan tertentu (Natasia, 2022). Sejalan dengan definisi tersebut, dalam *A Report to The Nations fraud* didefinisikan sebagai penyalahgunaan sumber daya atau aset organisasi untuk keuntungan pribadi yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, dan merupakan tindakan penyalahgunaan.

ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) sebagai organisasi anti *fraud* kelas dunia menemukan bahwa ada 2.110 kasus dari 133 negara yang dimana setiap organisasi di dalamnya kehilangan 5% dari pendapatan tahunan akibat adanya *fraud*. ACFE mengkonfirmasi bahwa adanya kerugian hingga \$3,6 miliar dengan rata rata nilai kerugian per kasus adalah \$1,78 juta (Firdaus, 2025). Pada tahun 2020, Indonesia merupakan negara yang menyumbang kasus *fraud* terbanyak

di kawasan Asia Pasifik dari sebanyak 16 negara di kawasan Asia Pasifik, dengan total kecurangan yang terjadi adalah 36 kasus dari total 198 kasus (Kontan, 2022).

Fraud dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu korupsi (*corruption*), penyalahgunaan aset (*misappropriation*) dan kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*) (Sujana, 2020). ACFE Global pada tahun 2020 merilis hasil survei bahwa penyalahgunaan aset merupakan kasus terbanyak yang terjadi, dengan tingkat keterjadian sebesar 86%, kemudian kasus korupsi menempati posisi kedua dengan tingkat keterjadian sebesar 43%, dan kasus terbawah adalah kecurangan laporan keuangan dengan persentase 10%. Namun jika dilihat dari besar kerugian yang diakibatkannya, kasus kecurangan laporan keuangan menimbulkan tingkat kerugian tertinggi diantara kategori kecurangan lainnya, yaitu sebesar \$954.000. Sedangkan korupsi menempati peringkat kedua dengan nilai kerugian sebesar \$200.000, dan kasus penyalahgunaan aset menimbulkan kerugian sebesar \$100.000 (ACFE Global, 2020).



Gambar 1. 1

Jumlah Kerugian dan Persentase Kasus Berdasarkan Jenis Fraud

Tidak hanya hasil ACFE saja, penelitian oleh RSM Indonesia tahun 2020 juga menemukan bahwasanya kasus manipulasi laporan keuangan memiliki persentase insiden yang lebih kecil dari yang lain tetapi menjadi kasus dengan nilai kerugian terbesar dengan cenderung lebih dari 5 milyar Rupiah. Berikut adalah tabel dari RSM Indonesia.

Tabel 1. 1

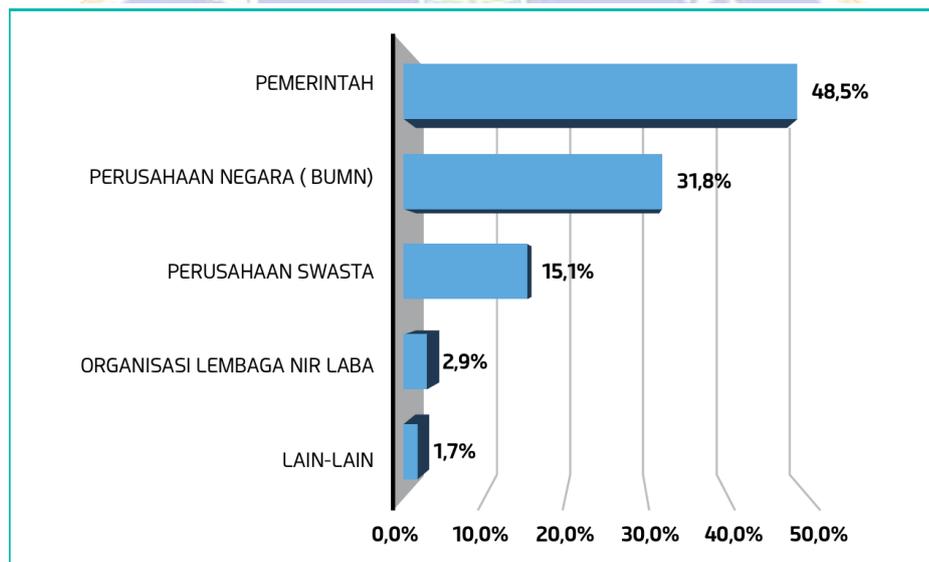
Kerugian Akibat Fraud Laporan Keuangan di Indonesia Tahun 2020

Nilai kerugian	Persentase
<Rp500juta	13%

Rp500juta-1milyar	8%
Rp1-5 milyar	12%
>Rp5milyar	57%

Sumber: RSM Indonesia 2020

Hasil survei ACFE Indonesia dari tahun 2019-2022 menyatakan bahwa Lembaga pemerintahan dan BUMN menempati posisi dua tertinggi sebagai lembaga yang paling dirugikan karena kasus *fraud* di Indonesia, dengan total kerugian Lembaga Pemerintahan sebesar 48,5% dan BUMN sebesar 31,8%, lalu diikuti oleh perusahaan swasta sebesar 15,1 %, kemudian organisasi nirlaba 2,9% dan terakhir adalah lain-lain sebesar 1,7%. Dengan adanya 2 posisi teratas yang sedang dialami oleh Pemerintahan dan BUMN maka kasus *fraud* pada BUMN pada saat ini sering menjadi sorotan publik. Di bawah adalah gambar pembagian persentase untuk setiap jenis organisasi/lembaga yang paling dirugikan karena adanya *fraud*.



Gambar 1. 2

Jenis organisasi/Lembaga yang paling dirugikan karena fraud

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam mendukung perekonomian nasional (CNN, 2025). BUMN di Indonesia beroperasi di berbagai sektor usaha, terdapat 12 sektor usaha yang menjadi bidang operasi dari setiap perusahaan BUMN meliputi energi, keuangan, infrastruktur, telekomunikasi, dll. Dari 12 sektor usaha tersebut, sektor

infrastruktur adalah sektor yang paling disorot pada saat ini. Melansir dari Bisnis.com, terdapat 5 anggaran jumbo di APBN 2023. Yang pertama adalah Anggaran Pendidikan Rp 612,2 triliun, lalu Anggaran Bansos Rp476 triliun, kemudian Anggaran Infrastruktur Rp392,1 triliun, keempat Anggaran Ketahanan Energi Rp341,3 triliun, dan terakhir adalah Anggaran Pertahanan dan keamanan Rp316 triliun (Kamalina, 2023). Melihat adanya kondisi di atas, Perusahaan BUMN sektor infrastruktur tentu akan mendapat dana yang lebih besar jika dibandingkan dengan Perusahaan BUMN pada sektor lainnya.

Sepanjang tahun 2020-2023, telah terjadi berbagai peristiwa *fraud* di perusahaan BUMN terutama *financial statement fraud* pada sektor infrastruktur. Besarnya APBN di sektor infrastruktur memunculkan fenomena kecurangan laporan keuangan yang terjadi pada perusahaan BUMN ini. Kasus yang paling menarik perhatian adalah dari perusahaan PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) dan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT). Direktur Utama PT. Waskita Karya, Destiawan memerintahkan penggunaan dana SCF melalui dokumen palsu untuk mencairkan dana dan membayar utang akibat proyek fiktif. Ini disebabkan oleh adanya pendanaan berupa *Supply Chain Financing* (SCF) yang memungkinkan perusahaan mendapatkan dana dari bank dengan menggunakan tagihan proyek. Akibat kecurangan ini, PT. Waskita Karya mengalami kerugian sebesar Rp 830,63 miliar (Ika, 2023).

Selain adanya kasus di atas, terdapat kasus gagal bayar yang dialami oleh kedua perusahaan BUMN tersebut pada tahun 2023. Terjadi *window dressing* atau pemolesan laporan keuangan perusahaan BUMN PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) dan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT). PT. Wijaya Karya (Persero) menunda pembayaran pokok Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 yang jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2023 (Ariyanti, 2024). Dilihat dari historisnya, gagal bayar tersebut bukan kali pertama, karena sebelumnya perusahaan pernah gagal bayar pada Juni 2023. Sementara itu, PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. telah berulang kali memperoleh suspensi saham dari BEI (Bursa Efek Indonesia) karena gagal bayar utang. Adanya laporan PT. Waskita Karya (persero) Tbk. yang tidak wajar sejak tahun 2016 turut menimbulkan dugaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang

indikasi bahwa rekayasa laporan keuangan telah dilakukan sejak lama (Baderi, 2023).

Dengan adanya kasus kecurangan laporan keuangan yang terjadi pada perusahaan BUMN di atas, tentu akan menyebabkan hilang kepercayaan publik terhadap perusahaan yang melakukan kecurangan. Hal ini terjadi karena laporan keuangan merupakan tolak ukur kinerja perusahaan sehingga jika dimanipulasi maka banyak pihak yang dirugikan (Budiwitjaksono, 2021). Perlu dilakukan sebuah pendeteksian kecurangan laporan keuangan untuk mengetahui faktor apa saja yang mendorong terjadinya *fraud* melalui *fraud hexagon theory* yang merupakan teori pembaruan dari teori sebelumnya yaitu *fraud triangle theory*, *fraud diamond theory* dan *fraud pentagon theory* (Agustini, 2022).

Menurut Cressey dalam (Christian, 2019) menuturkan bahwa ada 3 faktor utama penyebab terjadinya *fraud* yang kemudian disebut dengan *Triangle Fraud theory*, yaitu *pressure*, *opportunity* dan *rationalization*. Selanjutnya teori tersebut berkembang menjadi *Diamond Fraud Theory* yang dikemukakan oleh Wolfe dan Hermanson pada tahun 2004, kemudian berkembang lagi menjadi *Pentagon Fraud Theory* yang dikemukakan oleh Marks pada tahun 2012, yang kemudian teori tersebut dikembangkan lagi menjadi *Hexagon Fraud Theory* oleh Vousinas pada tahun 2019 (Setyono, 2023). Elemen yang ada pada *Hexagon Fraud Theory* adalah Stimulus (*pressure*), *Capability*, *Collusion*, *Opportunity*, *Rationalization*, *Ego*.

Teori *Fraud Hexagon* memberikan kerangka analitis untuk memahami berbagai faktor yang mendorong terjadinya kecurangan. Pada elemen *pressure*, kestabilan keuangan dan *Financial Target* menjadi indikator utama yang dapat memotivasi manajemen untuk melakukan manipulasi. Penelitian dari (Oktavia, 2022) menunjukkan bahwa *Financial Stability* berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud* laporan keuangan. Sementara itu, *pressure* yang diukur dengan *Financial Target* tidak berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud* laporan keuangan. Bertentangan dengan hasil ini, *Financial Target* berpengaruh positif signifikan terhadap pendeteksian *financial statement fraud* didapatkan dari hasil penelitian Ginting (2022). Elemen *capability* yang diukur dengan tingkat Pendidikan CEO perusahaan menunjukkan bahwa adanya tingkat pendidikan yang tinggi dari seorang CEO akan berpengaruh terhadap tingkat kecurangan pada laporan

keuangan yang dilakukan (Jannah, 2021). Namun Hasnawati (2024) mendapatkan bahwa *CEO Education* tidak berpengaruh terhadap *financial statement fraud*. Elemen *collusion* mencakup kerja sama antara lebih dari satu pihak untuk mencapai tujuan tertentu, termasuk manipulasi laporan keuangan. Hasnawati (2024) menyatakan bahwa kolusi tidak berpengaruh terhadap *financial statement fraud*, namun pada penelitian lain menyatakan bahwa proyek pemerintah sebagai proksi kolusi berpengaruh positif signifikan terhadap potensi kecurangan laporan keuangan (Aulia, 2023).

Elemen lain seperti *opportunity* terkait dengan ketidakefektifan pengawasan dalam perusahaan dapat berdampak positif bagi manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan. Bersamaan dengan hasil penelitian di atas, elemen *rationalization* mencakup upaya pembenaran yang dilakukan manajemen seperti mengganti auditor berpengaruh positif terhadap tindakan kecurangan manipulasi laporan keuangan (Jannah, 2021). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jannah pada variabel ketidakefektifan pengawasan (*ineffective monitoring*) dan juga *Chance Auditor* bertolak belakang dengan hasil penelitian dari Aulia (2023) yang dimana *ineffective monitoring* dan *change in auditor* tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan laporan keuangan. Terakhir, elemen *arrogance*, yang dapat diukur melalui jumlah foto CEO dalam laporan tahunan, menunjukkan tingkat arogansi dari petinggi perusahaan. Menurut Budiwitjaksono, (2020) arogansi ini dapat memicu kecurangan karena individu yang arogan cenderung tidak ingin kehilangan posisinya, sehingga berpengaruh terhadap terjadinya *financial statement fraud*. Namun frekuensi kemunculan gambar CEO pada penelitian Hernanda (2022) mendapatkan bahwa tidak memiliki pengaruh terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.

Dengan adanya *research gap* (ketidakkonsistenan) hasil penelitian terdahulu, maka dalam penelitian ini dilakukan pengujian kembali pada setiap variabel penelitian di dalam *fraud hexagon theory* yang nantinya akan mempengaruhi terjadinya *financial statement fraud*. Penelitian ini memiliki kebaruan yang signifikan dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya. Studi ini akan menguji model *Fraud Hexagon* terhadap laporan keuangan perusahaan di sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-

2023. Hingga saat ini, belum ada penelitian terdahulu yang secara spesifik mengaplikasikan *Fraud Hexagon Theory* untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan pada sektor ini. Jangka waktu selama 4 tahun diambil merujuk pada Buku *Financial Analysis and Decision Making* yang menyoroti bahwa jangka waktu 4 tahun dalam laporan keuangan memberikan keseimbangan antara mendapatkan wawasan mendalam dan mempertahankan efisiensi analisis tanpa membebani dengan data historis yang terlalu jauh (Hawkins, 2002). Tidak hanya itu, adanya fenomena peningkatan kasus *window dressing* dalam laporan keuangan pada sektor infrastruktur menunjukkan urgensi penelitian ini. Kasus-kasus tersebut menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang diakibatkan oleh perusahaan BUMN, mencerminkan lemahnya pengawasan dan akuntabilitas di sektor infrastruktur.

Dengan demikian, berdasarkan urgensi permasalahan ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh *Fraud Hexagon Model* Terhadap *Financial Statement Fraud* (Studi Kasus Perusahaan BUMN yang Terdaftar di BEI Sektor Infrastruktur Tahun 2020-2023)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, identifikasi masalah yang ada dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) melaporkan terdapat 2.110 kasus fraud global dengan kerugian \$3,6 miliar,
2. Meskipun jumlah kasus kecurangan laporan keuangan hanya 10%, namun menimbulkan tingkat kerugian tertinggi yaitu sebesar \$954.000.
3. Hasil survei ACFE Indonesia dari tahun 2019-2022 lembaga pemerintahan dan BUMN adalah lembaga yang paling dirugikan karena kasus *fraud*.
4. Adanya praktik manipulasi laporan keuangan pada perusahaan BUMN sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI, seperti PT Waskita Karya dan Wijaya Karya yang mengakibatkan kerugian negara sangat besar.
5. Tingginya anggaran yang diberikan terhadap perusahaan BUMN terutama sektor infrastruktur selama periode 2020-2023 memberi dampak meningkatkan potensi terjadinya *fraud*.

6. Ketidakefektifan pengawasan internal perusahaan di sektor infrastruktur yang menciptakan peluang terjadinya manipulasi laporan keuangan.
7. Kurangnya penelitian yang secara spesifik menerapkan *Fraud Hexagon* untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan terutama di perusahaan BUMN sektor infrastruktur.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menjaga fokus penelitian dan menghindari pembahasan yang terlalu luas, pembatasan masalah penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan pada perusahaan BUMN sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI selama periode 2020-2023 menggunakan *Fraud Hexagon Theory*.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang yang sudah dijelaskan, maka penulis mengkaji ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu :

1. Apakah *Financial Target* berpengaruh terhadap terjadinya *Financial Statement Fraud*?
2. Apakah *Financial Stability* berpengaruh terhadap terjadinya *Financial Statement Fraud*?
3. Apakah *CEO Education* berpengaruh terhadap terjadinya *Financial Statement Fraud*?
4. Apakah proyek pemerintah berpengaruh terhadap *Financial Statement Fraud*?
5. Apakah *ineffective monitoring* berpengaruh terhadap terjadinya *Financial Statement Fraud*?
6. Apakah *change in auditor* berpengaruh terhadap terjadinya *Financial Statement Fraud*?
7. Apakah *frequent number of CEO's picture* berpengaruh terhadap terjadinya *Financial Statement Fraud*?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh *Financial Target* terhadap terjadinya *Financial Statement Fraud*
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh *Financial Stability* terhadap terjadinya *Financial Statement Fraud*
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh *CEO Education* terhadap *Financial Statement Fraud*
4. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh proyek pemerintah terhadap *Financial Statement Fraud*
5. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh *ineffective monitoring* terhadap terjadinya *Financial Statement Fraud*
6. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh *change in auditor* terhadap terjadinya *Financial Statement Fraud*
7. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh *frequent number of CEO's picture* terhadap *Financial Statement Fraud*

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas cakupan pemahaman teoritis mengenai *Fraud Hexagon* sebagai model analitis untuk mendeteksi potensi kecurangan laporan keuangan, khususnya di perusahaan BUMN sektor infrastruktur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik, memberikan kontribusi pada studi-studi tentang kecurangan laporan keuangan, dan menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut yang relevan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam studi empiris. Hal ini juga berfungsi sebagai latihan penyusunan karya ilmiah yang mendukung syarat kelulusan program studi Akuntansi.

b. Bagi Regulator dan Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk menyusun kebijakan pengawasan keuangan yang lebih efektif, khususnya di

sektor infrastruktur yang berisiko tinggi terhadap kecurangan. Dengan pendekatan dan kebaruan yang dimiliki, penelitian ini diharapkan menjadi landasan penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di perusahaan BUMN sektor infrastruktur serta memberikan manfaat luas bagi berbagai pemangku kepentingan.

c. **Bagi Perusahaan Sektor Infrastruktur**

Penelitian ini memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang dapat mendorong terjadinya kecurangan. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan pengawasan internal dan tata kelola untuk mencegah manipulasi laporan keuangan.

d. **Bagi Masyarakat Umum/Pembaca**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan kepada masyarakat tentang pentingnya transparansi laporan keuangan dan dampak negatif dari manipulasi terhadap kepercayaan publik dan ekonomi secara keseluruhan.

